



SUMBER BERITA

SELASA, 22 MEI 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemeriksaan Pejabat Dinsos PMD Diundur

Dugaan Korupsi DD Limbur Lama

KEPAHIANG - Dijadwalkan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang akan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kepahiang, kemarin (21/5). Namun pemeriksaan terpaksa diundur

meskipun ketiga saksi yang dipanggil sudah datang memenuhi panggilan.

Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH melalui Kasi Intel, Arya Marsepa, SH mengatakan, jika pemanggilan terhadap ketiga saksi tersebut memang dijadwalkan kemarin (21/5). Meskipun pihak saksi sudah datang, namun penyidik kebetulan ada kegiatan lain sehingga terpaksa pemeriksaan diundur. "Nanti pemeriksaannya terhadap saksi akan kita atur ulang

kembali," ujar Arya.

Arya mengaku jika pemeriksaan terhadap pihak Dinsos PMD tersebut berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) Limbur Lama yang saat ini tengah diusut penyidik dan sudah menetapkan dua tersangka. Penyidik menganggap perlu memeriksa saksi dari pihak dinas guna mengetahui sejauh mana peran maupun pembinaan yang dilakukan dinas dalam pengelolaan DD tersebut.

Mereka memanggil saksi mulai dari Kadis, Kabid dan staf tersebut juga untuk mensinkronkan masing-masing keterangan yang sebelumnya sudah pernah disampaikan para saksi saat pemeriksaan sebelumnya. "Nanti akan kita susun dahulu jadwal pemeriksaannya, kita berharap nanti para saksi tetap bisa datang dan memberikan keterangannya," katanya.

Sekadar mengulas, dalam perkara DD Limbur Lama ini sudah menetapkan

dua tersangka masing-masing, Kades berinisial, RS dan konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas Ha. Keduanya pun sudah ditahan jaksa dengan dititipkan ke Lapas Kelas IIA Curup. Dalam perkara ini, penyidik mengindikasikan ada mark up, SPj fiktif dan kekurangan volume pekerjaan yang merugikan negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Daerah (Ipda) Kepahiang mencapai Rp 300 juta. (zie)